



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2019 KABUPATEN TEMANGGUNG

Assalamu'alaikum Wr. Wb
Bismillahirrohmanirrohim.

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2019 dapat disampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Temanggung, sesuai amanat Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Daerah, kepada masyarakat bersama dengan penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Kepala Daerah menyampaikan Ringkasan LPPD kepada masyarakat bersama dengan penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, yang dilakukan 1 kali dalam 1 tahun, paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Penyusunan Ringkasan LPPD ini untuk menginformasikan kepada masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Temanggung pada Tahun Anggaran 2019, sehingga masyarakat dapat memberikan tanggapan atau saran atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang selanjutnya berguna sebagai bahan perbaikan program kerja dan peningkatan kinerja pemerintahan daerah. Tanggapan atau saran itu dapat disampaikan kepada kepala daerah dengan tembusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lambat 6 bulan setelah Ringkasan LPPD disampaikan.

A. KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH

II. VISI DAN MISI

"TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM".

Untuk mewujudkan visi dimaksud, dirumuskan 3 Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

- Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;
- Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;
- Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.

B. PRIORITAS DAERAH

Membangunan Tahun 2019 ditujukan untuk konsolidasi birokrasi, pemetaan potensi, peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, dan penanggulangan kemiskinan, dengan prioritas sebagai berikut:

- Pemenuhan kebutuhan pendidikan dasar masyarakat;
- Pemenuhan kebutuhan kesehatan dasar masyarakat;
- Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas Sumber Daya Manusia;
- Penanggulangan kemiskinan.

III. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Konkuren

A. Urusan Wajib

- Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan** 8 program dan 85 kegiatan : 91,87%

No	Program	Capaian
1	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	74,94%
2	Program peningkatan Akses Pendidikan Sekolah Dasar	99,54%
3	Program Peningkatan Mutu Pendidikan SD	93,33%
4	Program Peningkatan Akses Pendidikan SMP	97,43%
5	Program Peningkatan Mutu Pendidikan SMP	96,69%
6	Program Peningkatan Akses Pendidikan Usia Dini	94,73%
7	Program Peningkatan Mutu Pendidikan Usia Dini	93,80%
8	Program Peningkatan Mutu Pendidikan Usia Dini	88,67%

- Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan** 4 program dan 35 kegiatan tercapai 90,39%

- Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** Jalan kabupaten : 84,15%

Terhubungnya pusat-pusat kegiatan : 100%
Persentase jembatan kabupaten : 92,28%
Persentase jaringan irigasi : 57,41%
Persentase pelayanan drainase skala kawasan/kota : 46,14%
Layanan informasi jasa konstruksi : 100%
Pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang : 87,70%.

- Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman** Rumah tinggal yang terlayani air bersih layak : 86,73%,
Rumah layak huni : 88,32%
Kawasan kumuh perkotaan : 11,21%
Cakupan RTH publik : 0,09%.

- Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat** 3 program dan 14 kegiatan : 89,92%.

- Urusan Pemerintahan Bidang Sosial** Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Meningkatnya PMKS yang mendapat perlindungan sosial dan pembangunan ekonomi

- Urusan Pemerintahan Bidang Ketenagakerjaan** Penempatan pencari kerja : 2.357 orang (69,2%)
Kepesertaan BPJS tenaga kerja : 87,15%
Pemenuhan UMK perusahaan : 72,45%

- Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** 2 program dan 12 kegiatan:
Peningkatan Kualitas dan Perlindungan perempuan dan anak : 94,14%
Peningkatan Kualitas dan Pembinaan Ketahanan Keluarga : 55,90%

- Urusan Pemerintahan Bidang Pangan** 1 program 9 kegiatan : 88,15%.

- Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian** 1 kasus : 100%

- Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup**

88,77% dari 10 indikator
Penanganan sampah : 67,23%.

- Urusan Pemerintahan Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil** Jumlah wajib e-KTP : 591.955 orang, sudah terekam e-KTP : 589.079 orang (99,51%)
Penduduk berakta kelahiran : 530.737 orang dari 791.264 (67,07%)

- Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** Peluang Desa Mandiri: 48 desa

- Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** Peserta KB aktif 77,57%. Jumlah peserta KB aktif : 103.717 orang dari 143.830 orang.
Rasio Petugas Penyuluh KB : 1 petugas membina 6 desa/kelurahan

- Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan** 3 program : 98,13%.

- Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika** Capaian kinerja : 94,31%.

- Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan UKM** Jumlah UKM aktif naik 89,83%
Jumlah usaha mikro naik 70,63%

- Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal** Nilai investasi : Rp 375.600.000.000

- Urusan Pemerintahan Bidang Pemuda dan Olah Raga** Program pembinaan kepemudaan : 96,41%
Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga : 100%

- Urusan pemerintahan Bidang Statistik** 1 program dan 4 kegiatan : 100%.

- Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan** Hasil capaian : 82,52%.

- Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan** Jumlah pengunjung perpustakaan : 686.019 orang.
Koleksi perpustakaan : 42.626 buku
Perpustakaan keliling ke 20 Kecamatan

- Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan** Program Pengelolaan dan Pelestarian Arsip Daerah : 100%

B. Urusan Pilihan

- Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan** Jumlah produksi ikan : 13.475 ton
Konsumsi ikan 22,74 kg/kapita/tahun.

- Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata** Kunjungan 423.155 orang. Terdapat 17 desa wisata

- Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian** Produktifitas padi 6,41 ton/ha
Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB : 24,14%

- Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan** Sektor perdagangan berkontribusi : 20,50%
naik 0,7% dari tahun sebelumnya 19,8%.

- Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian** Kontribusi sektor industri tahun 2018 : 27,08%
Diadakan Krenova (Kreativitas dan Inovasi Masyarakat) oleh BAPPEDA

- Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- Perencanaan**

RPJMD telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2019

RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 23 urusan wajib dan 5 urusan pilihan telah dilaksanakan

- Keuangan** 6 program : 100 persen

- Pengawasan** Temuan pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Temanggung : 466 temuan.

- Pendukung Urusan Perangkat Daerah** 4 program dan 54 kegiatan
Anggaran penunjang : Rp 62.251.781.115,00
serapan Rp 55.541.529.847,00 (89,22%)

- Administrasi Pemerintahan** Dilaksanakan 23 perangkat daerah (3 badan/dinas dan 20 kecamatan) dengan 19 program dan 155 kegiatan. Alokasi: Rp 61.421.657.271,00
serapan Rp 55.994.542.248,00 (91,16).

- Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah** 66 jenis sistem informasi manajemen ber jumlah 461 aplikasi

- Indeks Kepuasan Masyarakat** 1 Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik dengan hasil kategori B (baik).
Survei kepatuhan terhadap Undang-Undang Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung yang dilakukan Komisi Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Jawa Tengah tahun 2018 nilainya : 84,45%

PENGHARGAAN YANG DIRAIH TAHUN 2019

- Predikat Penilaian "B" atas Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
- Medali Opini "Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)" atas hasil laporan keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018. Ini merupakan opini WTP yang ketujuh kalinya;
- Penghargaan Pembangunan Daerah, pada tahun 2019 mendapatkan Juara I di tingkat Provinsi Jawa Tengah dan Juara II di Tingkat Nasional. Penghargaan tersebut diberikan atas keunggulan dokumen Perencanaan pada tahun 2018 yang diberikan di tahun 2019;
- Juara Harapan I Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Regional II Tahun 2019 yang di berikan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menganugerahkan penghargaan Sanitarian Puskesmas Terbaik Kabupaten SBS (ODF) 100% Tahun 2019;
- Juara I Kabupaten Kota Bertransaksi Kartu Tani Terbanyak dari Gubernur Jawa Tengah; dan
- Pemenang Stan Terbaik dan Favorit Bursa Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 dari Gubernur Jawa Tengah.



H. MUHAMMAD AL KHADZIQ
BUPATI TEMANGGUNG



DRS. R. HERI IBNU WIBOWO
WAKIL BUPATI TEMANGGUNG

